

KEPENTINGAN NASIONAL MAROKO DALAM NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN ISRAEL MELALUI ABRAHAM ACCORD

Muh Fachry Mauladi Irwan¹, Suwarti Sari², Iing Nurdin³

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
2. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
2. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

The concept of normalization is currently being discussed in international politics. Under the Abraham Accords, diplomatic relations between Israel and Morocco have been strengthened by regulating several bilateral aspects, including cultural, economic, diplomatic, and security fields. In terms of trade and tourism, the agreement means that Israel and Morocco will improve and expand their air routes, with the goal of ensuring that flights carry passengers from both countries, whether tourists, entrepreneurs, or other travelers. This research uses a descriptive qualitative research method. Data collection techniques were carried out through literature review and interviews. The results of the analysis show that the Western Sahara conflict is the main factor driving the normalization of relations between Morocco and Israel. The United States provided three main incentives to Morocco to achieve this agreement: recognition of Morocco's sovereignty over Western Sahara, the provision of investment funds, and the sale of modern military equipment. Political support from a powerful country like the United States is crucial for Morocco to strengthen its position in the conflict with the Polisario and to enhance its status in the region. This normalization agreement is expected to boost Morocco's economic growth through trade and investment cooperation with Israel, which is known for its strengths in capital and technology. The United States played a significant role in this process, particularly under President Trump's leadership, who supported Morocco regarding Western Sahara and was actively involved in discussions and lobbying with Moroccan leaders to achieve the normalization agreement.

Keywords: National Interests, Normalization, Abraham Accords

ABSTRAK

Konsep normalisasi hubungan saat ini sedang diperbincangkan di dalam politik internasional. Dalam Abraham Accords, hubungan diplomatik antara Israel dan Maroko diperkuat dengan mengatur beberapa aspek bilateral kedua negara yaitu bidang budaya, ekonomi, diplomatik, dan keamanan. Di bidang perdagangan dan pariwisata, perjanjian tersebut berarti bahwa Israel dan Maroko akan memperbaiki dan memperluas rute udara mereka, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pesawat membawa penumpang dari kedua negara, baik wisatawan, pengusaha atau penumpang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi putaka dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik Sahara Barat merupakan faktor utama yang mendorong normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel. Amerika Serikat memberikan tiga insentif utama kepada Maroko untuk mencapai kesepakatan ini: pengakuan kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, pemberian dana investasi, dan penjualan peralatan militer modern. Dukungan politik dari negara kuat seperti Amerika Serikat sangat penting bagi Maroko untuk memperkuat posisinya dalam konflik dengan Polisario dan meningkatkan statusnya di kawasan. Kesepakatan normalisasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Maroko melalui kerjasama perdagangan dan investasi dengan Israel, yang dikenal memiliki keunggulan dalam modal dan teknologi. Amerika Serikat memainkan peran signifikan dalam proses ini, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Trump, yang mendukung Maroko terkait Sahara Barat dan aktif dalam diskusi serta lobi dengan pemimpin Maroko untuk mewujudkan kesepakatan normalisasi hubungan.

Kata kunci : Kepentingan Nasional, Normalisasi, Abraham Accord

PENDAHULUAN

Hubungan negara-negara arab dengan Israel hingga saat ini tidak menunjukkan keharmonisan, justru sering memperlihatkan adanya konflik. Hubungan negara arab dan israel dilatarbelakangi oleh penolakan negara arab atas pembentukan Israel, sehingga dalam hal tersebut menimbulkan konflik bersenjata antara kedua kelompok negara tersebut. Sejak tahun 1948 dimana pada Israel terbentuk, telah terjadi beberapa perang besar antara Israel dan Negara-negara arab seperti Perang Enam Hari tahun 1967, Perang Yomkippur 1973 dan beberapa perang lainnya.

Konsep normalisasi hubungan saat ini sedang diperbincangkan di dalam politik internasional. Secara historis, kata normalisasi digambarkan sebagai “*a return to normalcy*” sebuah istilah yang telah digunakan dalam ilmu kesehatan sejak tahun 1800. Namun hingga saat ini istilah “normalisasi” telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam bidang politik internasional dan menjadi sebuah konsep dalam hubungan luar negeri suatu negara. Mengutip Bartson, normalisasi adalah kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengakhiri suatu konflik melalui beberapa kesepakatan yang disepakati bersama, seperti gencatan senjata, perjanjian damai, atau terjalinnya hubungan diplomatik antar pihak. Bartson menjelaskan bahwa:

“Normalization is seen as a method involving; the popularity of the requirement for live to scale back tension or friction, and their introduction; promotion of improved relations; and isolation, containment or resolution – whole or part – of major sources of dispute or tension.”

Normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab baru terjadi pada abad ini. Menelusuri sejarahnya, negara Israel telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Mesir dan Yordania, dua negara yang pernah terlibat perang dengan Israel. Pada tahun 1948, Mesir dan Israel terlibat dalam Perang Arab-Israel. Pada tahun 1973, kedua negara juga terlibat dalam Perang Yom Kippur. Hingga akhirnya Mesir dan Israel memutuskan untuk berdamai pada tahun 1979 ketika menyepakati Perjanjian Damai Mesir-Israel. Tahun sebelumnya, pada tahun 1978, Israel dan Mesir mencapai kesepakatan mengenai Perjanjian Camp David yang ditengahi oleh Presiden AS Jimmy Carter. Selain Mesir, Yordania juga melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini terjadi karena negara tersebut terlibat dalam perang tahun 1967 melawan Israel, yang dikenal sebagai Perang Enam Hari. Pasca keterlibatan Yordania dalam Perang Enam Hari, kedua negara

menyepakati hubungan dalam Perjanjian Damai Israel-Yordania tahun 1994. Perjanjian damai tersebut secara resmi menandai berakhirnya perang antara Yordania dan Israel yang telah berlangsung sejak tahun 1948.

Hubungan antara Maroko dan Israel didasarkan pada fakta bahwa Maroko merupakan rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di Arab. Mayoritas orang Yahudi di Maroko adalah imigran Yahudi Spanyol yang diusir secara massal oleh monarki Katolik Spanyol pada tahun 1491. Setelah berdirinya Negara Israel pada tahun 1948, banyak orang Yahudi Maroko terpaksa beremigrasi karena meningkatnya anti-Semitisme di kota-kota provinsi di seluruh Maroko. Israel saat ini menjadi rumah bagi sekitar satu juta orang Yahudi Maroko dan memiliki hubungan dekat dengan Kerajaan Maroko.

Dalam Abraham Accords, hubungan diplomatik antara Israel dan Maroko diperkuat dengan mengatur beberapa aspek bilateral kedua negara yaitu bidang budaya, ekonomi, diplomatik, dan keamanan. Di bidang perdagangan dan pariwisata, perjanjian tersebut berarti bahwa Israel dan Maroko akan memperbaiki dan memperluas rute udara mereka, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pesawat membawa penumpang dari kedua negara, baik wisatawan, pengusaha atau penumpang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, peneliti tertarik mengkaji lebih jauh mengenai **Kepentingan Nasional Maroko Dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Dengan Israel Melalui Abraham Accord**

KERANGKA ANALITIK

Pada bagian ini, penulis menyampaikan ide dan konsep yang digunakan oleh para peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai kepentingan nasional Maroko dalam normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accords. Bagian ini mencakup teori-teori dasar dan pandangan para ahli yang relevan dengan topik yang dibahas, sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

1. Teori Neorealisme

Pendekatan neorealisme, yang diperkenalkan oleh Kenneth Waltz (1979) dalam *Theory of International Politics*, menekankan bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional dan bahwa pola interaksi negara-negara dapat dijelaskan melalui struktur atau sistem internasional. Neorealisme berfokus pada anarki dalam sistem internasional, di mana negara-negara berusaha untuk menjaga kepentingan nasionalnya di tengah ketidakpastian global. Neorealisme mengajukan konsep "self-help," di mana negara harus melindungi diri dari ancaman eksternal. Negara bertindak berdasarkan kepentingan

rasional untuk menjaga keamanan dan keseimbangan kekuasaan. Walaupun kerja sama antar negara dimungkinkan, neorealisme menyoroti bahwa kerja sama tersebut sering kali dibatasi oleh ketidakpastian, karena negara cenderung menghindari ketergantungan pada negara lain. Dalam konteks hubungan Maroko-Israel, teori neorealisme menjelaskan bagaimana Maroko, sebagai negara yang rasional, mempertimbangkan dinamika internasional dan regional sebelum melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah, serta reaksi negara-negara Arab lainnya, menjadi faktor penting dalam perhitungan Maroko untuk menjaga keamanan nasionalnya.

2. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang digunakan oleh negara dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di panggung internasional untuk mencapai kepentingan nasional. Kebijakan ini melibatkan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, serta memperhitungkan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang ada di lingkungan domestik maupun internasional. Menurut K.J. Holsti. (1997) kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti kebijakan sosial, ekonomi, dan keamanan, serta faktor eksternal seperti sistem internasional dan struktur ekonomi dunia. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis kebijakan luar negeri Maroko terkait normalisasi hubungan dengan Israel, dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan tersebut.

3. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan konsep yang penting dalam hubungan internasional, karena menjadi landasan bagi negara untuk menjalankan kebijakan luar negeri. Menurut Hans J. Morgenthau (1979), kepentingan nasional mencakup kemampuan negara untuk melindungi identitas politik, fisik, dan budaya dari campur tangan asing. Kepentingan nasional mencakup empat kategori utama: pertahanan, ekonomi, regulasi internasional, dan ideologi. Dalam konteks hubungan Maroko-Israel, Maroko memperhitungkan kepentingan nasionalnya, termasuk kepentingan ekonomi dan keamanan, dalam keputusan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

4. Konsep Geopolitik

Geopolitik merujuk pada interaksi antara faktor-faktor geografis dan politik yang memengaruhi keputusan kebijakan luar negeri. Saul Bernard Cohen (2003) mendefinisikan geopolitik sebagai interaksi antara kondisi geografis dengan

proses politik. Geopolitik melibatkan faktor-faktor geografis seperti letak wilayah, sumber daya alam, serta strategi politik yang berkaitan dengan posisi negara dalam sistem internasional. Geopolitik dan geostrategi sangat relevan dalam hubungan Maroko dengan Israel, terutama dalam pertimbangan strategis terkait letak geografis dan kepentingan politik regional.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai alat bantu. Penelitian ini disusun berdasarkan data deskriptif yang menggambarkan “kepentingan nasional Maroko dalam normalisasi hubungan dengan Israel.” Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang memerlukan penyelidikan variabel dan mempelajari fenomena secara lebih mendalam untuk memahami pertanyaan penelitian. Dalam hal ini penelitian yang menggunakan metode kualitatif memusatkan perhatian pada fenomena atau proses permasalahan yang diteliti, dan hasilnya memuat makna-makna yang muncul dari eksplorasi peneliti dalam proses tersebut (Creswell, 2011).

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam makalah ini adalah studi pustaka. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu, penulis bermaksud memberikan penjelasan tentang normalisasi hubungan diplomatik Maroko dengan Israel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan secara interaktif dalam proses reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, akan dianalisis keikutsertaan Maroko dalam Abraham Accord sebagai langkah untuk normalisasi hubungan dengan Israel, serta kepentingan nasional yang mendorong Maroko untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik tersebut. Keputusan Maroko untuk bergabung dalam perjanjian ini mencerminkan dinamika kompleks dalam politik luar negeri Maroko, termasuk pertimbangan keamanan, strategi regional, dan upaya untuk memperluas hubungan internasional. Hal ini juga menunjukkan bagaimana Maroko mengelola hubungan dengan Israel dalam konteks dinamika politik Timur Tengah yang terus berkembang.

Normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel, yang dimediasi oleh Amerika Serikat, didorong oleh faktor strategis dan geopolitik yang signifikan. Salah satu faktor kunci adalah pengakuan Amerika Serikat terhadap kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara

Barat, yang telah lama menjadi sengketa antara Maroko dan kelompok separatis Front Polisario yang didukung oleh Aljazair.

Faktor Normalisasi Hubungan Maroko dan Israel

Proses negosiasi yang berlangsung selama dua tahun, terutama dengan peran besar dari Jared Kushner dan Avi Berkowitz, menempatkan isu Sahara Barat sebagai elemen penting dalam kesepakatan ini. AS, melalui Abraham Accords, memberikan pengakuan resmi atas klaim Maroko terhadap Sahara Barat sebagai imbalan atas kesediaan Maroko untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan ini juga mencakup kerja sama di berbagai sektor seperti ekonomi, teknologi, perdagangan, dan militer, yang semuanya dipandang bermanfaat bagi kedua negara (Rimapradesi, Yulia, and Ahmad Sahide, 2021).

Dari perspektif Maroko, normalisasi ini bukanlah sekadar pemulihan hubungan baru, tetapi pengembalian hubungan yang sebelumnya sudah ada namun terputus sejak tahun 2000. Di samping itu, Maroko tetap menegaskan posisi historisnya mengenai dukungan terhadap Palestina dan status khusus Yerusalem sebagai kota suci bagi tiga agama monoteistik. Dalam deklarasi bersama yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, Israel, dan Maroko, ketiga negara sepakat untuk memperkuat hubungan diplomatik penuh, memulai penerbangan langsung, dan mempromosikan kerja sama ekonomi yang inovatif.

Dari sudut pandang strategis, normalisasi ini memberikan keuntungan bagi Maroko, terutama dalam hal mendapatkan akses ke teknologi militer Israel, seperti drone, yang penting dalam menghadapi ancaman dari Aljazair dan Front Polisario. Di bidang ekonomi, investasi dari Israel di sektor energi terbarukan, teknologi, dan pariwisata juga memberikan dorongan ekonomi bagi Maroko.

Secara keseluruhan, normalisasi hubungan Maroko dan Israel melalui kesepakatan ini mencerminkan kepentingan bersama di bidang perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, di mana kedua negara berupaya menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

1. Kepentingan Politik Maroko dalam Normalisasi Hubungan Maroko dan Israel

Normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel pada akhir 2020 mencerminkan kepentingan strategis Maroko di berbagai bidang, seperti keamanan, ekonomi, dan diplomasi. Faktor utama yang mendorong langkah ini adalah pengakuan Amerika Serikat atas kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, yang merupakan isu vital bagi negara tersebut. Dari sisi ekonomi, normalisasi membuka peluang kerja sama di sektor teknologi, pertanian, dan

pariwisata yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Maroko. Secara diplomatik, langkah ini memperkuat posisi Maroko di kancah internasional dan mempererat hubungan dengan negara-negara Barat. Normalisasi ini juga memiliki nilai historis dan budaya, mengingat ikatan lama antara komunitas Yahudi Maroko dan negara tersebut. Secara keseluruhan, normalisasi hubungan dengan Israel adalah bagian dari kebijakan luar negeri Maroko yang dirancang untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional di berbagai bidang. Kebijakan luar negeri ini dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan siapa yang berkuasa, yang menentukan prioritas dalam mencapai kepentingan nasional.

2. Kepentingan Militer Maroko dalam Menormalisasi Hubungan Dengan Israel

Kepentingan militer Maroko dalam menormalisasi hubungan dengan Israel sangat erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas pertahanan negara tersebut. Melalui kerja sama dengan Israel, Maroko memperoleh akses ke teknologi militer canggih, seperti pesawat tanpa awak (UAV) yang meningkatkan kemampuan pengawasan dan pertahanannya, terutama di kawasan Sahara Barat (Plano, Jack C, and Roy Olton, 1988). Kerja sama ini memungkinkan Maroko untuk memperkuat postur militer guna menghadapi ancaman dari Front Polisario dan Aljazair, yang dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan negara. Maroko juga diuntungkan dari akses lebih mudah terhadap peralatan militer canggih dari sekutu seperti Amerika Serikat dan Israel, termasuk pesawat tempur dan sistem pertahanan udara. Dengan dukungan ini, Maroko dapat lebih efektif mempertahankan klaimnya atas Sahara Barat, wilayah yang telah menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri dan keamanannya. Akuisisi drone dari Israel, seperti Heron, Harop, dan Hermes 900, memberikan Maroko keunggulan strategis dalam konflik di Sahara Barat dan mengurangi ketergantungan pada persenjataan konvensional. Selain itu, normalisasi hubungan dengan Israel memperkuat posisi tawar Maroko di arena internasional, mendapatkan dukungan yang lebih luas dari sekutu-sekutu utama dalam konflik Sahara Barat. Ini memberikan keuntungan signifikan dalam memperkuat pertahanan nasional Maroko dan mempertahankan posisinya di kawasan, terutama dalam menghadapi potensi ancaman militer dari Aljazair, yang terus memodernisasi angkatan bersenjata dengan dukungan Rusia. Secara keseluruhan, normalisasi hubungan dengan Israel bukan hanya memberikan keuntungan diplomatik dan ekonomi, tetapi juga menjadi landasan penting bagi peningkatan kemampuan militer Maroko dalam menghadapi tantangan keamanan di kawasan tersebut (Allison, Safwaan Zamakda, 2021).

3. Kepentingan Geopolitik Maroko Dalam Normalisasi Hubungan Antara Maroko Dan Israel

Kebijakan luar negeri Maroko sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan internasional atas klaimnya terhadap Sahara Barat, yang merupakan wilayah sengketa antara Maroko dan Front Polisario (SADR). Sejak Maroko memperoleh kemerdekaan dari Prancis dan Spanyol pada tahun 1956, wilayah Sahara Barat menjadi titik pusat konflik. Upaya Maroko untuk memperkuat posisinya di wilayah ini melibatkan berbagai strategi diplomatik, militer, dan ekonomi (Rimapradesi, Yulia, and Ahmad Sahide, 2021)..

a. Sejarah dan Konteks Konflik

Sejarah Sengketa:

- 1) Perjanjian Fez 1912:** Maroko menjadi protektorat Prancis, sementara Spanyol menguasai zona utara dan selatan. Pada tahun 1956, Prancis membatalkan perjanjian tersebut dan Spanyol meninggalkan pengaruhnya pada tahun 1965.
- 2) Pawai Hijau (1975):** Raja Hassan II memindahkan 300.000 warga dan 20.000 tentara ke Sahara Barat, yang memicu konflik dengan Front Polisario.
- 3) Gencatan Senjata 1991:** Setelah konflik bersenjata, gencatan senjata dicapai, namun usulan otonomi Maroko bagi Polisario tetap menjadi isu di Dewan Keamanan PBB.
- 4) Kepemilikan dan Penguasaan:** Maroko saat ini menguasai sekitar 80% dari Sahara Barat, termasuk wilayah pantai Atlantik yang kaya sumber daya. Maroko memandang wilayah ini sebagai bagian integral dari provinsi selatannya dan telah melakukan investasi besar di sana.

b. Strategi dan Diplomasi Maroko

Normalisasi dengan Israel:

- 1) Keuntungan Geopolitik:** Normalisasi hubungan dengan Israel memberikan keuntungan besar, termasuk dukungan militer dan akses ke teknologi canggih seperti UAV (pesawat tanpa awak). Ini juga membantu Maroko dalam mendapatkan pengakuan dari Amerika Serikat atas kedaulatannya di Sahara Barat.
- 2) Dukungan AS dan Israel:** Dengan dukungan AS, Maroko mendapatkan keunggulan dalam menghadapi Aljazair dan Front Polisario. AS juga berencana membuka konsulat di Dakhla, memperkuat klaim Maroko atas wilayah tersebut.

Kerja Sama Internasional:

- 1) **Hubungan dengan Amerika Serikat dan Prancis:** Kerja sama ini mencakup aspek politik, ekonomi, dan militer. Maroko berusaha mengimbangi pengaruh negara-negara yang mendukung Polisario seperti Libya dan Aljazair.
- 2) **Perdagangan dan Investasi:** Kesepakatan normalisasi membuka peluang untuk investasi dan perdagangan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Maroko dan memperkuat posisinya.

c. Hubungan Regional dan Internasional

Uni Afrika: Maroko meninggalkan Uni Afrika pada tahun 1984 karena ketidaksetujuan Uni Afrika terhadap klaim Maroko di Sahara Barat. Namun, Maroko kembali bergabung pada tahun 2017 dengan tujuan untuk memperkuat perekonomiannya dan mendapatkan dukungan lebih lanjut untuk klaimnya di Sahara Barat.

- d. **Hubungan dengan Negara-Negara Afrika dan Amerika Latin:** Maroko terus berupaya untuk memperbaiki hubungan dan meningkatkan dukungan internasional, meskipun masih menghadapi tantangan dari negara-negara yang mendukung Polisario.

Isu Terorisme dan Keamanan:

Ancaman dari Aljazair dan Front Polisario: Maroko menghadapi ancaman dari dukungan Aljazair terhadap Polisario serta potensi serangan teroris. Kerja sama dengan AS dan Israel memberikan akses ke intelijen dan dukungan militer yang penting untuk mengatasi ancaman ini.

4. Kepentingan Ekonomi Dalam Hubungan Maroko dan Israel

Ekonomi Maroko telah mengalami transformasi signifikan sejak awal 1980-an dengan mengadopsi kebijakan liberalisasi yang berfokus pada keterbukaan perdagangan dan integrasi dengan pasar internasional. Negara ini telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan mitra utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Arab serta Afrika, yang menghilangkan tarif pada sebagian besar barang dan meningkatkan ekspor serta impor (Lesser, Ian, et al., 2021). Maroko memiliki sektor ekonomi yang beragam, dengan fosfat, pertanian, dan pariwisata sebagai pilar utama, dan sektor jasa menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB). Normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords telah membuka peluang besar bagi kerjasama di bidang teknologi, energi, dan pertanian, yang dapat mendukung Maroko dalam mengatasi tantangan seperti kekeringan dan ketergantungan energi. Selain itu, perjanjian

perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan dukungan dari lembaga seperti USAID memperkuat posisi Maroko dalam perekonomian global. Maroko juga berupaya memperluas pengaruhnya di Afrika dengan meningkatkan perdagangan dan investasi, serta memanfaatkan teknologi dan pengetahuan dari Israel untuk memajukan sektor pertaniannya. Dengan langkah- langkah ini, Maroko berusaha mengokohkan posisinya sebagai pusat ekonomi di benua Afrika, sambil memanfaatkan keuntungan strategis dari hubungan internasionalnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel, mengevaluasi kepentingan Maroko dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, serta mengidentifikasi peran Amerika Serikat dalam proses normalisasi tersebut. Sebelumnya, Maroko dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik, yang menghambat perkembangan hubungan politik dan ekonomi di antara keduanya. Salah satu hambatan utama adalah konflik Sahara Barat, yang telah menjadi masalah signifikan dalam hubungan internasional dan diplomasi Maroko. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik Sahara Barat merupakan faktor utama yang mendorong normalisasi hubungan antara Maroko dan Israel. Amerika Serikat memberikan tiga insentif utama kepada Maroko untuk mencapai kesepakatan ini: pengakuan kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, pemberian dana investasi, dan penjualan peralatan militer modern. Dukungan politik dari negara kuat seperti Amerika Serikat sangat penting bagi Maroko untuk memperkuat posisinya dalam konflik dengan Polisario dan meningkatkan statusnya di kawasan. Kesepakatan normalisasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Maroko melalui kerjasama perdagangan dan investasi dengan Israel, yang dikenal memiliki keunggulan dalam modal dan teknologi. Amerika Serikat memainkan peran signifikan dalam proses ini, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Trump, yang mendukung Maroko terkait Sahara Barat dan aktif dalam diskusi serta lobi dengan pemimpin Maroko untuk mewujudkan kesepakatan normalisasi hubungan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Gadi Hitman and Chen. "The Case for Arab-Israeli Normalization during Conflict." *The Journal for Interdisciplinacy Middle Eastern Studies* (2018): 43-63.
- Muhammad, Simelia Victoe. "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel Dan Isu Palestina." *Jurnal Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII* (2020) hlm.10

Rimapradesi, Yulia, and Ahmad Sahide. "Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan Dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan Dengan Israel." Jurnal Mandala

Buku/Disertasi

Ronald Peter Barston. *Modern Diplomacy*. New York: Routledge, 2013

Waltz, Kenneth. *Theory of International Politics*. Massachusetts: Addison-Wesley, 1979

Rosenau, James, Gavin Boyd and Kenneth Waltz. *World Politics : An Introduction*. New York: The Free Press, 1976.

Hans J Morgenthau. Politics among nations : the struggle for power and peace. New York: Knopf, 1978.

John W. Creswell, Educational Research: Planning, Conducting And Evaluating Quantitative And Qualitative Research: Fourth Edition (Boston: Pearson Education 2011), hal.205.

Plano, Jack C, and Roy Olton. *The International Relations Dictionary*. Santa Barbara, Calif. : ABC-Clío, 1988.

Artikel

Britannica. Arab-Israeli wars summary. 19 Januari 2024. 24 Januari 2024.
<<https://www.britannica.com/summary/Arab-Israeli-wars>>.

Mezan, Karim and Alissa Pavia. Morocco and Israel are friendlier than ever thanks to the Abraham Accords. But what does this mean for the rest of North Africa? 21 Oktober 2021. 31 Januari 2024.

<<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/morocco-and-israel-are-friendlier-than-ever-thanks-to-the-abraham-accords-but-what-does-this-mean-for-the-rest-of-north-africa/>>

Allison, Safwaan Zamakda . “A Paradigm Shift in the Recognition of Moroccan Sovereignty over Western Sahara.” *The Journal of Middle East and North Africa Sciences*, vol. 7, no. 5, 12 May 2021, pp. 20–23.

Lesser, Ian , et al. “Morocco’s New Geopolitics : A Wider Atlantic Perspective.” 2012. Trading Econoics. “Morocco GDP Annual Growth Rate | 1999-2020 Data | 2021-2023 Forecast | Calendar.” Tradingeconomics.com, tradingeconomics.com/morocco/gdp-growth-annual. Accessed 14 July 2024.